

Jokowi Soroti Tak Adanya Kampus di Indonesia Masuk Top 100 Dunia

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti peringkat kampus-kampus di Indonesia yang belum mampu menembus top 100 dunia. Presiden meminta agar peringkat perguruan tinggi dalam negeri di tataran kampus-kampus dunia terus ditingkatkan.

"Perguruan tinggi dalam negeri harus terus didorong, harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi terbaik Indonesia harus terus diperbaiki berdasarkan US World yang ada setiap tahun," ujar Jokowi di acara Forum Rektor Indonesia yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/1).

"Saya lihat yang rankingnya 200 ke atas masih kecil sekali. Enggak usah saya sebut karena kecil sekali. Dan nilainya masih di atas 100. (Perguruan tinggi dalam negeri) yang masuk top 100 atau top 50 belum ada," ujarnya.

Meski demikian, Kepala Negara mengakui ada banyak kendala yang dihadapi. Antara lain soal anggaran yang kurang.

Kepala Negara juga mengaku kaget saat dirinya menerima laporan

soal angka rasio penduduk berpendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) terhadap populasi produktif di Indonesia.

Angka rasio sebesar 0,45 persen tersebut sangat rendah.

"Kejauhan sekali 0,45 persen sama (Malaysia) 2,43 persen. Angkanya memang kelihatannya, tapi kalau dikalikan ini sudah berapa kali. Lima kali lebih rendah dengan negara-negara yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi.

"Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu di angkanya 0,45 persen, 0,45 persen," kata Jokowi.

"Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," ungkapnya.

Presiden pekan ini langsung akan menggelar rapat untuk membahas soal rasio tersebut. Sekaligus akan mencari solusi kebijakan apa yang akan diambil pemerintah ini meningkatkan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 itu. ● mar

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



SIDANG DUGAAN PELANGGARAN KEPP

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) memimpin sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan teradu ketua dan anggota KPU RI di Ruang sidang DKPP, Jakarta, Senin (15/1). Persidangan yang beragendakan pemeriksaan saksi ahli yang dihadirkan pihak pengadu dan teradu tersebut terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU karena telah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pascaputusan MK.

Yusril Minta Penyidikan Kasus Pemerasan Firl Bahuri ke SYL Dihentikan, Ini Alasannya

Yusril Ihza Mahendra bersedia jadi saksi yang meringankan untuk Firl Bahuri karena ingin penegakan hukum yang benar-benar fair, jujur dan adil.

JAKARTA (IM) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra meminta agar penyidik menghentikan penyidikan kasus pemerasan eks Ketua KPK Firdi Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Yusril menilai proses penegakan hukum terhadap Firl Bahuri dilakukan tergesa-gesa. Sebab Firl Bahuri ditetapkan sebagai tersangka sebelum polisi melakukan penyelidikan.

"Ya kasus ini kan langsung ditetapkan jadi tersangka tanpa penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan itu kan dua proses yang harus berjalan seiring. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka kan harus diadakan satu penyelidikan kecuali kasus tangkap tangan," kata Yusril saat berada di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (15/1).

"Ini kan pak Firl ditetap-kan di hari penyelidikan, hari itu juga dan ditsangkakan hari itu juga. Loh itu kapan melakukan penyidikannya? Itu keagalannya," ujarnya.

Kejanggalan lainnya, menurut Yusril, adalah karena tak ada satupun saksi yang telah diperiksa yang men-erangkan bahwa SYL diperas.

"Begitu juga saksi yang diperiksa, tidak satu pun men-erangkan bahwa memang ada kata-kata atau perbuatan yang mengancam pak Yasin (Syahrul Yasin Limpo) supaya merasa dia diperas. Kan engga ketemu ya, sampe hari itu belum ada buktinya," katanya.

Oleh karena itu, ia men-arankan pihak kepolisian untuk menghentikan perkara tersebut. Terlebih, praperadilan Firl Bahuri tak diterima.

"Sebenarnya kasus ini sebaiknya dihentikan. Bisa dihentikan lewat praper-

dilan, bisa juga dikeluarkan SP3. Dan kita tau kan kemarin praperadilan nya bukan ditolak. Walaupun banyak wartawan salah nulis nih. Permohonan pra-peradilan ditolak, tidak. Permohonan peradilan itu tidak dapat diterima. Tidak diterima itu bukan di tolak," katanya.

"Artinya hakim tidak masuk ke perkara karena esepi dari termohon PMJ diterima yaitu permohonan praperadilannya itu mencampur adukan antara formil dan materil padahal praperadilan itu hanya forumnya saja, karena itu dianggap permohonan itu tidak jelas. Maka hakim menyatakan tidak diterima. Kalau tidak dapat diterima itu bisa diajukan kembali. Bukan ditolak, kalau ditolak ya selesai," katanya.

Saksi Meringankan

Yusril bersedia menjadi saksi yang meringankan untuk Firl Bahuri. Alasannya agar penegakan hukum terhadap Firl Bahuri benar-benar fair, jujur dan adil. "Mengapa saya mau menjadi saksi ahli atau saksi meringankan? Karena saya selalu berpendapat bah-

wa penegakan hukum pidana itu harus benar-benar fair jujur dan adil," katanya.

Menurut Yusril, jika penyidik dapat menghadirkan saksi memberatkan dan menghimpun alat bukti. Maka tersang-

ka dapat diberikan hak yang sama dengan menghadirkan saksi meringankan.

"Supaya penyelidikan dan penyidikan itu berjalan secara adil dan berimbang, itu yang pertama," katanya. ● han

Anies Baswedan Sebut Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran dan Harus Diubah

AMBON (IM) - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menyebut subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini tak tepat sasaran. Hal itu justru seringkali membuat kelangkaan BBM di banyak tempat, terutama di daerah kepulauan di Indonesia.

"(Kelangkaan) ini juga dialami di banyak tempat yang kawasan kepulauan tentu Maluku mengalaminya, jadi kami melihat (penyebabnya) bahwa banyak sekali subsidi BBM yang tidak tepat sasaran," ujarnya saat kampanye dialog dengan tawar "Desak Anies" di Ambon, Maluku, Senin (15/1).

Anies kemudian memberikan data yang pernah diucapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait subsidi BBM. Subsidi solar misalnya, 89 persen dinikmati dunia usaha dan hanya 11 persen yang dinikmati oleh masyarakat umum. Namun dari 11 persen masyarakat itu, 95 persennya adalah keluarga yang sudah mampu.

"Hanya 5 persen keluarga yang tidak mampu, jadi petani, nelayan itu hanya menikmati 5 persen (dari 11 persen penerima) subsidi solar," imbuh Anies.

TKN Prabowo Yakin Gibran Kuasai Debat Keempat: "Let Him Cook"

JAKARTA (IM) - Arief Rosyid, Komandan Fanta (Pemilih Muda) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, meyakini Gibran akan menguasai debat cawapres yang digelar pada Minggu (21/1).

Tema dalam debat keempat itu merupakan isu-isu yang memang dikuasai anak muda.

"Isu yang ada tadi energi, sumber daya alam, pangan, pajak, karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat, ini adalah isu-isu yang dikuasai oleh anak muda, isu-isu yang dibutuhkan oleh anak-anak muda yang jumlahnya mayoritas," ujar Arief saat ditemui di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Senin (15/1).

"Jadi kita akan yakin bahwa Mas Gibran penguasaannya ini akan ya mirip-mirip lah, 11-12 dengan penguasaan debat kedua. Dikira cukup ternyata suhu," ujarnya.

Gus Arief menyatakan bahwa Gibran sebelumnya banyak diragukan jelang debat kedua. Bahkan, warganet ra-

ma dapat diberikan hak yang sama dengan menghadirkan saksi meringankan.

"Supaya penyelidikan dan penyidikan itu berjalan secara adil dan berimbang, itu yang pertama," katanya. ● han

Begitu juga BBM pertalite yang disebut hanya 20 persen keluarga prasejahtera yang menikmati harga subsidi, sedangkan sisanya adalah keluarga mampu.

"Ini kondisi yang harus kita ubah agar subsidi itu diterima oleh mereka yang membutuhkan, bukan subsidi diterima oleh mereka yang sudah berkemampuan, ini potret kenyataannya," kata Anies.

Anies mengatakan, sesuatu yang sifatnya di bawah harga pasar seperti BBM bersubsidi hampir pasti akan menjadi langka. Sebab itu dia ingin mengoreksi sistem subsidi BBM agar tepat sasaran dengan cara mendata secara rinci siapa yang layak mendapatkan subsidi.

"Menurut kami harus ada kejelasan nanti siapa yang bisa mendapatkan solar subsidi, siapa yang bisa mendapatkan pertalite subsidi, sehingga subsidi itu tepat sasaran, dan jangan sampai yang membutuhkan petani, nelayan, keluarga prasejahtera justru gagal mendapatkan yang subsidi. Karena tidak disiapkan sistemnya kita akan siap dengan sistemnya untuk bisa menjangkau mereka yang membutuhkan," tandasnya. ● mei



IDN/ANTARA

PELANTIKAN PJ BUPATI KOLAKA

Pj Gubernur Sulteng Andap Budhi Revianto (kanan) bersama Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru (kiri) melakukan salam komado di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Senin (15/1). Andi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulteng ditunjuk menjadi Pj Bupati Kolaka menggantikan Pejabat sebelumnya Muh. Jayadin.

Bicara soal Pemilu, Alissa Wahid dan Sejumlah Tokoh Temui SBY

JAKARTA (IM) - Sejumlah tokoh yang menamakan diri sebagai Gerakan Nurani Bangsa menemui Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/1).

Tokoh-tokoh tersebut antara lain putri sulung Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas.

Bersama SBY, para tokoh ini bicara mengenai penyelenggaraan pemilu yang konstitusional.

"Tadi kami mendapatkan banyak sekali insight dari perjalanan Pak Presiden SBY dalam proses transisi sebetulnya pada masa 2014 lalu," kata Alissa Wahid di Cikeas, Minggu (14/1).

"Dan kami sama-sama sepakat bahwa pemilu itu sudah ada mekanismenya, mekanisme konstitusional," ujarnya.

Alissa menyebutkan,

pihaknya dan SBY sepakat bahwa penyelenggaraan pemilu telah diatur oleh konstitusi dan undang-undang. Tak ada pihak yang boleh melanggar aturan tersebut.

"Siapa pun, termasuk warga bangsa, tapi terutama penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu, harus juga melihat ini dan tidak sampai crossing the line," ujarnya.

Kakak dari Yenny Wahid itu mengaku tak akan menunjuk pihak yang mereka nilai melanggar aturan. Hanya saja, pihaknya bakal turut mengingatkan. Sebagaimana pesan SBY, lanjut Alissa, ke depan Gerakan Nurani Bangsa bakal terus bersafari ke tokoh-tokoh bangsa untuk memastikan pemilu terselenggara dengan baik.

"Jadi gerakan nurani bangsa bisa juga menjadi ruang komunikasi dengan berbagai pihak. Nanti, kalau ada apa-apa, kalau kondisinya membutuhkan kita duduk bersama sebagai bangsa, Gerakan Nurani Bangsa perlu mengambil perannya," kata Alissa. ● han

Ganjar Sebut Pembatasan Usia dalam Lamaran Kerja Tidak Fair

PURBALINGGA (IM) - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai, pembatasan usia dalam lamaran pekerjaan merupakan tindakan diskriminatif atau tidak 'fair'. Menurut Ganjar, mendapatkan pekerjaan adalah hak setiap orang.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini menyebut bahwa dirinya sering menerima keluhan dari masyarakat yang tidak bisa mendapat pekerjaan karena terbentur syarat usia saat melamar pekerjaan. "Banyak orang yang menyampaikan, 'lho pak saya masih muda pak, kok kemudian saya tidak masuk bekerja', rasanya enggak fair juga," kata Ganjar di Purbalingga, Senin

(15/1).

Menurut politikus PDI-P itu, orang-orang yang berusia muda bukan berarti memiliki kemampuan kerja melampaui yang tua, begitu pun sebaliknya. Sebab, menurut Ganjar, ukuran kemampuan bekerja semestinya didasarkan pada hasil tes, bukan usia seseorang. Oleh sebab itu, mantan gubernur Jawa Tengah tersebut berjanji bakal menghapuskan batas usia pelamar kerja apabila terpilih sebagai presiden kelak.

"Masukan kepada kami cukup banyak terkait itu maka kami akan pertimbangkan. Masukan itu saya kira memberikan suasana fair karena kerja itu adalah hak setiap warga

negara," ujar Ganjar.

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berjanji bakal menghapus batas usia pelamar kerja jika pasangan Ganjar-Mahfud terpilih memenangi Pilpres 2024. Mahfud menyatakan hal itu menanggapi adanya lowongan kerja di salah satu bank yang menetapkan batas maksimal usia pelamar 24 tahun.

"Kalau hanya keputusan menteri atau mungkin keputusan gubernur BI (Bank Indonesia), nanti bisa pemerintah lebih mudah untuk mengajak mengubah. Tinggal revisi undang-undang (UU) atau apa," kata Mahfud di Pasuruan, Jumat (12/1), dikutip dari *Antara*. ● me

IDN/ANTARA



PERINGATAN HARI DHARMA SAMUDERA 2024

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali (tengah) memberi hormat saat memperingati Hari Dharma Samudera 2024 di perairan Teluk Jakarta, Senin (15/1). Peringatan yang berlangsung di geladak KRI Banda Aceh-593 tersebut bertepatan Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang Tangguh, Profesional dan Modern.

mandiri

PENGUMUMAN

Telah dilakukan Pengalihan Piutang atau *Cessie* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk pada tanggal 29 Desember 2023 dengan keterangan sebagai berikut :

- 1) Nama Debitur PT. Borneo Setia Jaya.
- 2) Nilai Pengalihan Piutang (*Cessie*) sebesar Rp. 53,979,855.84.-
- 3) *Cessionaris* a.n Moch. Lukman yang bertempat tinggal di Arenan, RT. 010, RW. 007, Kel. Tugu, Kec. Cimanggis, Kota Depok, Prov. Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt. 29 Desember 2023 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama PT. Borneo Setia Jaya telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Collection & Recovery Center Jakarta